

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA-013.08.2.409205/2019
I A. INFORMASI KINERJA**

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (08) Ditjen Peraturan Perundang-Undangan
Provinsi : (20) SULAWESI TENGGARA
Kode>Nama Satker : (409205) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KENDARI

Kuasa Pengguna Anggaran : Sofyan
Bendahara Pengeluaran : Asriani
Pejabat Penanda tangan SPM : Sismolo

Halaman : IA . 1

1 Fungsi	03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN		143.272.000
Sub Fungsi	03.03	PEMBINAAN HUKUM		143.272.000
2 Program	013.08.06	Program Pembentukan Hukum		143.272.000
Sasaran Program	01	Terbentuknya peraturan-perundang-undangan yang berkualitas		
Indikator Kinerja Program	01.01	Jumlah peraturan perundang-undangan yang disusun sesuai dengan perencanaan dan Program Legislasi Nasional (Prolegnas)	4 RUU	
	01.02	Persentase (%) harmonisasi peraturan perundang-undangan yang diselesaikan sesuai dengan permohonan	80 %	
	01.03	Persentase (%) perancangan peraturan daerah yang terfasilitasi sesuai dengan permohonan	80 %	
Output Program	01	Rancangan Peraturan Perundang-undangan		
Indikator Output Program	01	Jumlah Peraturan Perundang-undangan yang disusun sesuai dengan Perencanaan dan Program Legislasi Nasional (PROLEGNAS)	4 RUU	
	02	Persentase (%) Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang diselesaikan Sesuai dengan Permohonan	80 %	
	03	Persentase (%) Perancangan Peraturan Daerah yang difasilitasi Sesuai Standar	80 %	
Kegiatan	5250	Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Hukum di Wilayah		143.272.000
Sasaran Kegiatan	01	Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah		
Indikator Kinerja Kegiatan	01.01	Persentase (%) rancangan peraturan daerah yang terfasilitasi sesuai dengan permohonan		
Sasaran Kegiatan	02	Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan		
Indikator Kinerja Kegiatan	02.01	Jumlah perancang peraturan perundang-undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan		
Output Kegiatan	5250.001	Fasilitasi pembentukan produk hukum daerah	30,00 Raperda	120.810.000
	5250.001	Fasilitasi pembentukan produk hukum daerah	10,00 Raperda	120.810.000
Indikator Output Kegiatan	01	persentase (%) rancangan peraturan daerah yang terfasilitasi sesuai dengan permohonan	677 raperda	
Output Kegiatan	5250.002	Pembinaan perancang peraturan perundang-undangan di daerah	18,00 Orang	22.462.000
	5250.002	Pembinaan perancang peraturan perundang-undangan di daerah	35,00 Orang	22.462.000
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah perancang peraturan perundang-undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan	1052 Orang	

Jakarta, 5 Desember 2018
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

ttd.

Prof. Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.
NIP 197105011993031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA-013.08.2.409205/2019
I B. SUMBER DANA**

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (08) Ditjen Peraturan Perundang-Undangan
Provinsi : (20) SULAWESI TENGGARA
Kode>Nama Satker : (409205) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KENDARI

Halaman I B. 1

						Pagu	Ekuivalen Rupiah		
1. Anggaran Tahun 2019	Rp.	143.272.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri	(1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	143.272.000			(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
2. PNBP	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri	(1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0			(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri		IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri		IDR	0		
6. SBSN	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung		IDR	0		
				f. Hibah Dalam Negeri Langsung		IDR	0		

2. Rincian Pinjaman / Hibah :

(Dalam Ribuan)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	RpLN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA-013.08.2.409205/2019
II. RINCIAN PENGELUARAN
(RIBUAN RUPIAH)

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 Unit Organisasi : (08) Ditjen Peraturan Perundang-Undangan
 Provinsi : (20) SULAWESI TENGGARA
 Kode / Nama Satker : (409205) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KENDARI
 Kewenangan : (KD)

Halaman II.1

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
409205	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KENDARI	-	143.272	-	-	-	143.272		
013.08.06	Program Pembentukan Hukum	-	143.272	-	-	-	143.272		
5250	Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Hukum di Wilayah	-	143.272	-	-	-	143.272		
5250.001	Fasilitasi pembentukan produk hukum daerah	-	120.810	-	-	-	120.810	20.51	
01	RM	-	120.810	-	-	-	120.810	060	
5250.002	Pembinaan perancang peraturan perundang-undangan di daerah	-	22.462	-	-	-	22.462	20.51	
01	RM	-	22.462	-	-	-	22.462	060	
	J U M L A H	-	143.272	-	-	-	143.272		

Jakarta, 5 Desember 2018
 Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

ttd.

Prof. Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.
 NIP 197105011993031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA-013.08.2.409205/2019
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (08) Ditjen Peraturan Perundang-Undangan
Provinsi : (20) SULAWESI TENGGARA
Kode dan Nama Satker : (409205) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KENDARI

Halaman : III.1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN DANA/PERKIRAAN PENERIMAAN												JUMLAH	
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	M E I	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	409205	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KENDARI														
		RENCANA PENARIKAN DANA	14.327	14.327	14.327	14.327	14.327	14.327	14.327	14.327	14.327	14.327	14.329	0	0	143.272
		52 BELANJA BARANG	14.327	14.327	14.327	14.327	14.327	14.327	14.327	14.327	14.327	14.327	14.329	0	0	143.272
	013.08.06.5250	Penyelenggaraan Fasilitas Pembentukan Hukum di Wilayah	14.327	14.327	14.327	14.327	14.327	14.327	14.327	14.327	14.327	14.327	14.329			143.272
		52 BELANJA BARANG	14.327	14.327	14.327	14.327	14.327	14.327	14.327	14.327	14.327	14.327	14.329	0	0	143.272

Jakarta, 05 Desember 2018
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

ttd.

Prof. Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.
NIP. 197105011993031001

**DAFTAR ISI AN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA-013.08.2.409205/2019
IV. A B L O K I R**

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (08) Ditjen Peraturan Perundang-Undangan
Provinsi : (20) SULAWESI TENGGARA
Kode dan Nama Satker : (409205) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KENDARI

Halaman : IV A.1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	U R A I A N	KODE	U R A I A N

Jakarta, 05 Desember 2018
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

ttd.
Prof. Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.
NIP 197105011993031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA-013.08.2.409205/2019
IV. B C A T A N**

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (08) Ditjen Peraturan Perundang-Undangan
Provinsi : (20) SULAWESI TENGGARA
Kode dan Nama Satker : (409205) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KENDARI

Halaman : IV B.1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	U R A I A N	KODE	U R A I A N

Jakarta, 05 Desember 2018
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

ttd.
Prof. Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.
NIP 197105011993031001

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : SP DIPA-013.08.2.409205/2019**

A. Dasar :

1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. UU No. xxxx Tahun xxxx tentang APBN TA xxxx (2) dan perubahannya

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran :

1. Kementerian Negara / Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
2. Unit Organisasi : (08) Ditjen Peraturan Perundang-Undangan
3. Provinsi : (20) SULAWESI TENGGARA
4. Kode>Nama Satker : (409205) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KENDARI
- Sebesar : Rp. 143.272.000 (SERATUS EMPAT PULUH TIGA JUTA DUA RATUS TUJUH PULUH DUA RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

013.08.06 Program Pembentukan Hukum
013.08.06.5250 Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Hukum di Wilayah

Jumlah Uang

Rp.	143.272.000
Rp.	143.272.000

C. Sumber Dana Berasal :

- | | | | | | |
|-------------------------------|-----|-------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni | Rp. | 143.272.000 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNBP | | | - Pinjaman Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| PNBP TA Berjalan | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | 5. Hibah Langsung | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Luar Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| | | | 6. SBSN PBS | Rp. | 0 |

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN K E N D A R I (060) Rp. 143.272.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. Petikan DIPA ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk Ditjen Peraturan Perundang-Undangan, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
2. Petikan DIPA ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman (digital stamp) sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. Petikan DIPA berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan dana yang tertuang dalam Petikan DIPA sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara Petikan DIPA dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. Petikan DIPA ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2XXX sampai dengan 31 Desember 2XXX.

DS: 5270-3969-1204-6294

Jakarta, 05 Desember 2018
A.N MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ASKOLANI
NIP. 196606111992021001